JIUBJ Jurnal Ilmiah
Universitas Batanghari Jambi
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 23, 1 (2023): 958-964
DOI: 10.33087/jiubj.v23i1.3104
http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah

Kebutuhan Lahan Kopi Minimum untuk Kesejahteraan Petani di Provinsi Lampung

Baiq Rindang Aprildahani, Nela Agustin Kurnianingsih, Marsista Buana Putri, Annisa Aprilia
Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, Indonesia
Correspondence email: rindang.aprildahani@pwk.itera.ac.id

Abstrak. Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris dan sebagai salah satu pengekspor kopi terbesar di dunia, masih memiliki masalah dengan kesejahteraan petani. Berkurangnya luas lahan pertanian dapat mengancam kesejahteraan petani. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian penelitian ini dengan mengambil studi kasus kesejahteraan petani kopi di Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan minimal luasan lahan kopi untuk menjaga stabilitas kesejahteraan petani kopi di Provinsi Lampung. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mengkaji upaya kesejahteraan petani perkebunan kopi, melalui faktor utamanya, yaitu kepemilikan tanah. Proses penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi hasil perhitungan nilai produksi dan harga pokok produksi kopi di Provinsi Lampung, yang kemudian dilanjutkan dengan menghitung tingkat kesejahteraan masyarakat petani kopi sehingga mendapatkan hasil akhir perhitungan kopi luas lahan kopi minimal di Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil perhitungan, setiap petani kopi di Provinsi Lampung membutuhkan rata-rata 4,06 hektar untuk memenuhi kesejahteraan sesuai dengan upah minimum penduduk. Sementara itu, berdasarkan Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022, rata-rata luas lahan yang dimiliki petani kopi di Provinsi Lampung masih jauh dari kebutuhan untuk memenuhi kesejahteraan petani tersebut, yang hanya mencapai 27% (1,1 Ha).

Kata kunci : Lahan Kopi; Kesejahteraan Petani; Kebutuhan Lahan; Provinsi Lampung.

Abstract. *Indonesia, which is known to be an agricultural country and as one of the largest coffee exporters in the world, still has problems with the welfare of farmers. Decreased in agricultural land area can threaten the welfare of farmers. This is one of the concerns of this study by taking a case study of the welfare of coffee farmers in Lampung. This study aims to identify the need for a minimum coffee land area to maintain the stability of the welfare of coffee farmers in Lampung. This research will be conducted using qualitative descriptive research methods to examine efforts in the welfare of coffee plantation farmers, through its key factor, namely land ownership. The research process was carried out by identifying the results of calculating the production value and cost of coffee production in Lampung, which was then continued by calculating the level of welfare of the coffee farming community in order to get the final result of calculating the minimum coffee land area in Lampung. Based on the calculation results, each coffee farmer in Lampung Province needs an average of 4.06 hectares to meet the welfare according to the resident minimum wage. Meanwhile, based on the 2020-2022 National Leading Plantation Statistics, the average land area owned by coffee farmers in Lampung Province is still far from the need to fulfill the welfare of these farmers, which only reaches 27% (1.1 Ha).*

Keywords **:** *Coffee Land; Welfare of Farmers; Land Requirement; Province of Lampung.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dimana pada umumnya masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (Husein, 2021). Data statistik Indonesia juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia setidaknya memiliki 74.957 desa. Karakteristik wilayah perdesaan yang didominasi oleh kegiatan pertanian, menguatkan asumsi bahwa Indonesia memang dapat disebut sebagai negara agraris. Aktivitas pertanian yang menjadi ciri khas dari wilayah perdesaan ternyata disinyalir memiliki kompleksitas permasalahan. Permasalahan di perdesaan diantaranya ialah masalah pengangguran, keterbelakangan, SDM, dan juga kemiskinan. Selain itu, Husein (2021) juga menjelaskan bahwa terdapat permasalahan, dimana luasan lahan pertanian di perdesaan semakin berkurang sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Ancaman alih fungsi lahan pertanian ini juga semakin tinggi karena

kepemilikan lahan pertanian yang rata-rata dimiliki oleh pihak luar perdesaan. Hal ini setidaknya berdampak pada kesejahteraan petani lokal yang notabene buruh tani menjadi semakin terdesak.

Wilayah perdesaan di Indonesia yang yang bergerak pada sektor pertanian, memiliki keragaman komoditas, antara lain: komoditas perkebunan, komoditas tanaman pangan, komoditas perikanan, komoditas peternakan, komoditas hortikultura, komoditas kehutanan, dan jasa pertanian serta perkebunan (Perdana, 2019). Menurut data statistik, komoditas perkebunan merupakan komoditas penyumbang PDRB terbesar dari sektor pertanian dimana salah satunya ialah komoditas kopi. Hal ini dikarenakan menurut Hamni, et al., (2013) menjelaskan bahwa komoditas kopi memiliki nilai ekonomis ekspor yang relatif tinggi di pasaran dunia. Tanaman kopi di Indonesia merupakan salah satu komoditas unggulan utama yang saat ini turut menyumbangkan devisa terhadap negara. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi dunia terutama ialah jenis kopi robusta (Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022). Menurut data luas areal dan produksi perkebunan kopi Indonesia menurut provinsi dan status pengusahaan tahun 2020, Provinsi Lampung memiliki luas areal perkebunan terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Sumatera Selatan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020). Adapun luas perkebunan kopi di Provinsi Lampung pada tahun 2020 mencapai 156.460 Ha yang merupakan perkebunan rakyat. Adapun total produksi kopi di Provinsi Lampung sejumlah 117.311 Ton yang terdiri dari kopi jenis arabika dan robusta (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020).

Perkebunan kopi di Provinsi Lampung merupakan perkebunan rakyat yang terpusat di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus. Kawasan perkebunan di Kabupaten Lampung Barat merupakan contoh perkebunan terbaik di Provinsi Lampung dalam hal peningkatan produksi dan mutu kopi, daerah ini juga telah menjadi lahan perkebunan kopi percontohan bagi Provinsi Lampung bahkan di tingkat Nasional (Hamni, et al., 2013). Komoditas kopi telah menjadi mata pencaharian utama bagi sebagian besar masyarakat yang tinggal di Lampung Barat. Data dari Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menyebutkan bahwa selama tiga tahun terakhir luas areal tanaman perkebunan kopi terus menurun dimana pada tahun 2019 luas areal tanaman kopi seluas 156.918 Ha, tahun 2020 seluas 156.458 Ha, dan pada tahun 2021 seluas 156.395 Ha. Apabila hal tersebut terus terjadi, maka penurunan kesejahteraan petani akibat penurunan luas pertanian dan bisa mengancam kesejahteraan petani kopi di Provinsi Lampung (Husein, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan dan gambaran terkait kebutuhan luasan lahan kopi minimum yang diperlukan untuk menjaga stabilitas kesejahteraan petani kopi di Provinsi Lampung.

METODE

Lokasi penelitian ini ialah Provinsi Lampung, adapun pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*), dengan mempertimbangkan bahwa provinsi tersebut merupakan penghasil kopi terbesar kedua di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini akan berorientasi pada data sekunder terkait data perkebunan kopi di Provinsi Lampung. Adapun metode analisis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yang melakukan perhitungan matematika sederhana dan menganalisis data-data secara efektif. Oleh karena itu, dihasilkan luas kebutuhan lahan minimal untuk mensejahterakan petani kopi. Hal tersebut diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan nilai produksi berdasarkan pendapatan minimum bagi kesejahteraan petani dan biaya produksi perkebunan kopi.

HASIL

Nilai Produksi Kopi

Produksi perkebunan kopi di Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah produksi perkebunan kopi terbesar kedua di Indonesia setelah Provinsi Sumatera Selatan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020). Tabel 1 berikut ini menunjukkan detail luas lahan, produksi, dan produktivitas kopi di Provinsi Lampung menurut kabupaten pada tahun 2020 dan 2021. Dalam menentukan kebutuhan lahan bagi kesejahteraan petani salah satu faktor pertimbangan yang berperan ialah angka produktivitas tanaman kopi. Produktivitas diartikan sebagai perbandingan antara *output* dan *input*. Berdasarkan tabel 1, rata-rata produktivitas tanaman kopi di Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebesar 754.78 Kg/Ha. Produktivitas tanaman kopi paling tinggi berada pada Kabupaten Tulang Bawang Barat, sementara produktivitas paling rendah berada pada Kota Metro. Apabila dinilai hanya dari

angka produktivitas saja, dapat dimungkinkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat akan membutuhkan luas lahan paling lebih sedikit guna mencapai standar kebutuhan lahan bagi kesejahteraan petani.

Tabel 1
Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Kopi Provinsi Lampung Tahun 2021

Kabupaten/Kota	**Luas (Ha)**	**Produksi (Kg)**	**Produktivitas**
Regency/Municipality	**2021**	**2021**	**Kg/Ha**
Lampung Barat	54.100	57.930.000	1070,79
Tanggamus	41.510	34.880.000	840,28
Lampung Selatan	730	420.000	575,34
Lampung Timur	520	240.000	461,54
Lampung Tengah	520	300.000	576,92
Lampung Utara	25.670	9.980.000	388,78
Way Kanan	21.650	8.710.000	402,31
Tulangbawang	80	20.000	250,00
Pesawaran	3.450	1.360.000	394,20
Pringsewu	1.380	710.000	514,49
Mesuji	40	20.000	500,00
Tulang Bawang Barat	10	10.000	1000,00
Pesisir Barat	6.660	3.430.000	515,02
Kota Bandar Lampung	80	40.000	500,00
Kota Metro	2	0	0,00
Lampung	156.390	118.040.000	754,78

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung, 2022

Setelah dirupiahkan, nilai produksi tersebut ternyata jauh dari harapan bagi petani kopi. Tabel 2 Menunjukkan rincian nilai produksi dan biaya produksi tahunan tanaman kopi Tahun 2018. Biaya produksi merupakan total biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk usaha satu hektar komoditas kopi per tahun. Total biaya produksi kopi merupakan harga pokok yang dikeluarkan dalam pembuatan suatu produk guna mendapatkan keuntungan (Tamriani, 2019). Data pada tabel 2 diperoleh dari analisis pendapatan usahatani kopi per hektar di Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Tahun 2018.

Tabel 2
Nilai Produksi dan Biaya Produksi Kopi Per Tahun Tanaman Per Hektar Tahun 2018

No	**Keterangan**	**Satuan**	**Jumlah Fisik**	**Harga (Rp)**	**Nilai**
1	**Penerimaan**				
	Produksi Kopi	Rp	698	19.840	13.848.320
	Penerimaan tumpang sari	Rp			3.936.539
2	**Biaya Produksi**				
	a. Biaya Tunai				
	- Pupuk Kandang	kg	750	1000	750.000
	- Urea	kg	136,85	2500	342.126
	- NPK	kg	108,11	3000	342.325
	- TSP	kg	112,22	2500	280.558
	- SP36	kg	93,44	3000	280.320
	- Sidolaris	liter	3,42	35000	119.224
	- Round up	liter	1,2	60000	71.833
	- Gramaxone	liter	1,08	60000	65.000
	- Tenaga kerja luar (TKLK)	HOK	75,89	50000	3.794.500
	- Pajak	Rp			26.578
	- Karung, tali, dll	Rp			92.325
	- Biaya angkut	Rp			230.119

	- Total biaya tunai	Rp	**6.376.908**
	b. Biaya Diperhitungkan		
	- Biaya Transportasi	Rp	272.881
	- Sewa lahan	Rp	2.000.000
	- Penyusutan	Rp	48825
	- T. Kerja dlm keluarga (TKDK)	HOK	1.715.000
	Total biaya diperhitungkan	Rp	**4.036.706**
	Total biaya	Rp	10.413.614
3	a. Pendapatan atas biaya tunai	Rp	**11.407.951**
	b. Pendapatan atas biaya total	Rp	7.371.245
4	a. R/C atas biaya tunai		2,79
	b. R/C atas biaya total		1,71

Sumber: Prasmatiwi *et al.*, 2020

Nilai produksi merupakan total nominal uang yang dihasilkan rumah tangga dari satu hektar komoditas kopi per tahun. Total nilai produksi mencakup biaya tunai dan biaya diperhitungkan. Berdasarkan data pendukung yang diperoleh dari analisis pendapatan usahatani kopi per hektar di Kecamatan Bulok diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan usahatani kopi atas biaya tunai adalah Rp. 11.407.951/ha dan pendapatan atas biaya total adalah Rp. 7.371.245/ha. Angka pendapatan tersebut masih dibawah Upah Minimum Provinsi Lampung.

Pengukuran Kesejahteraan Petani

Tujuan utama dalam penelitian ini ialah menentukan luas lahan perkebunan kopi dalam memenuhi kesejahteraan petani. Karena hal tersebut, maka penentuan ukuran kesejahteraan petani merupakan langkah penting yang harus dilakukan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari survey pemerintah sehingga pembanding yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan ialah kebutuhan hidup layak (KHL) berdasarkan ukuran pemerintah. Upah Minimum Regional (UMR) berdasarkan KHL tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012). UMR yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari surat M/11H.K.04/X/2020 mengenai penetapan gaji minimal di tahun 2022, dimana terdapat perbedaan UMR pada tiap Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Dalam upaya penyetaraan perhitungan penelitian ini, maka penentuan UMR nantinya akan disesuiakan dengan waktu panen kopi tahunan yang diasumsikan selama 12 bulan.

Tabel 3
Kebutuhan Nilai Produksi Kopi Per Tahun Provinsi Lampung Tahun 2021

Wilayah	UMR tahunan (Rp)	Biaya Produksi tahunan per hektar (Rp)	Kebutuhan Nilai Produksi tahunan per hektar (Rp)
Kota Bandar Lampung	31,838,664	10,413,614	42,252,278
Kota Metro	29,200,572	10,413,614	39,614,186
Lampung Barat	29,310,156	10,413,614	39,723,770
Lampung Selatan	29,185,800	10,413,614	39,599,414
Lampung Tengah	29,319,756	10,413,614	39,733,370
Lampung Timur	31,066,932	10,413,614	41,480,546
Lampung Utara	29,542,200	10,413,614	39,955,814
Mesuji	29,665,728	10,413,614	40,079,342
Pesawaran	30,806,016	10,413,614	41,219,630
Pesisir Barat	30,318,540	10,413,614	40,732,154
Pringsewu	31,066,932	10,413,614	41,480,546
Tanggamus	29,184,012	10,413,614	39,597,626
Tulang Bawang	29,184,012	10,413,614	39,597,626
Tulang Bawang Barat	29,184,012	10,413,614	39,597,626
Way Kanan	29,184,012	10,413,614	39,597,626

Sumber: data olahan

Harapan nilai produksi minimum tanaman kopi tahun 2021 didapatkan dari penjumlahan antara angka UMR tahunan tahun 2021 dam biaya produksi tanaman kopi tahun 2021. Sebelumnya biaya produksi tanaman kopi tahun 2021 dilihat dari ketetapan total biaya produksi

yaitu jumlah antara biaya tunai dan biaya diperhitungkan yang ada pada Tabel 2. yaitu sebesar Rp 10.413.614,00. Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki angka harapan nilai produksi minimum tanaman kopi tahun 2021 tertinggi berada pada Kota Bandar Lampung. Sedangkan, nilai harapan terendah ialah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Way Kanan sebab memilikin UMR terendah, yaitu Rp. 29.184,012,00. Hal tersebut menggambarkan kesenjanagan standar kehidupan berdasarkan nilai upah minimum pada Kota/Kabupaten di Provinsi Lampung. Jika berdasarkan data persebaran harapan nilai produksi minimum per tahun, maka petani di empat kabupaten dengan nilai harapan terendah akan membutuhkan luas lahan yang paling sedikit untuk memenuhi kesejahteraan petani kopi.

Kebutuhan Lahan Kopi Minimum untuk Kesejahteraan Petani

Setelah tolak ukur kesejahteraan petani berdasarkan UMP ditentukan, kemudian perlu dokonversi menjadi kebutuhan lahan. Hal tersebut diperlukan untuk mengukur kebutuhan lahan yang harus dikelola oleh petani guna mencapai standar kehidupan yang layak. Beberapa hal lain yang memengaruhi kebutuhan lahan petani dalam memenuhi standar kehidupan yang layak, yaitu tingkat produktivitas hasil pertanian dan harga hasil pertanian. Harga hasil pertanian yang digunakan dalam penelitian tanaman kopi ini ialah harga produsen kopi yang diperoleh dari survey harga perdesaan yang dilakukan oleh badan pusat statistik Provinsi Lampung tahun 2020.

Berdasarkan data statistik harga produsen pertanian Provinsi Lampung tahun 2020, didapatkan rata-rata harga komoditas kopi di Provinsi Lampung yaitu sebesar Rp. 18.727,00/Kg. Penilaian terhadap rata-rata harga komoditas kopi tersebut kemudian akan berdampak pada tingkat kesejahteraan petani melalui penjualan hasil produksi petani. Kemudian setelah angka harapan nilai produksi minimum tanaman kopi dihasilkan, maka angka tersebut kemudian dibagi dengan rata-rata harga produsen kopi, sehingga dihasilkan angka harapan produksi minimum tanaman kopi tahun 2021. Setelah angka harapan produksi minimum tanaman kopi ditentukan, maka selanjutnya ialah menentukan luas lahan minimum tanaman kopi tahun 2021 yang ditentukan dari hasil pembagian antara harapan nilai produksi minimum tanaman kopi tahun 2021 dengan angka pendapatan kopi per hektar tahun 2021. Tabel 4 menunjukkan penjabaran hasil perhitungan untuk setiap kota/kabupaten di Provinsi Lampung dengan asumsi biaya produksi tahunan tetap sama dengan biaya produksi tahunan per hektar sebelumnya. Dari 15 kota/kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang membutuhkan luas lahan tertinggi untuk memenuhi kesejahteraan petani dengan nilai 8,46 ha. Sementara Kabupaten Lampung Barat membutuhkan luas lahan terendah untuk memenuhi kesejahteraan petani dengan nilai 1,98 Ha. Angka tersebut dipengaruhi oleh nilai produktivitas tanaman kopi.

Tabel 4
Kebutuhan Lahan Pertanian untuk Kesejahteraan Petani Kopi Provinsi Lampung Tahun 2021

Kabupaten	Rerata Harga Biji Kopi (Rupiah/Kg)	Produktivitas (Kg/Ha)	Pendapatan Kopi (Rp/Ha)	Kebutuhan Luas Lahan Minimum Kopi (Ha)
Kota Bandar Lampung	Rp18,727	500	Rp9,363,659	4.51
Kota Metro	Rp18,727	0	Rp0	0.00
Lampung Barat	Rp18,727	1071	Rp20,056,957	1.98
Lampung Selatan	Rp18,727	575	Rp10,768,208	3.68
Lampung Tengah	Rp18,727	577	Rp10,805,662	3.68
Lampung Timur	Rp18,727	462	Rp8,652,021	4.79
Lampung Utara	Rp18,727	389	Rp7,284,927	5.48
Mesuji	Rp18,727	500	Rp9,363,659	4.28
Pesawaran	Rp18,727	394	Rp7,378,563	5.59
Pesisir Barat	Rp18,727	515	Rp9,644,569	4.22
Pringsewu	Rp18,727	514	Rp9,625,841	4.31
Tanggamus	Rp18,727	840	Rp15,730,947	2.52
Tulang Bawang	Rp18,727	250	Rp4,681,829	8.46
Tulang Bawang Barat	Rp18,727	1000	Rp18,727,318	2.11
Way Kanan	Rp18,727	402	Rp7,528,382	5.26
Rerata	Rp18,727	532.6	Rp9,974,169	4.06

Sumber: data olahan

Tabel 4 pada bagian perkebunan kopi terdapat informasi data mengenai luas areal dan jumlah petani kopi menurut provinsi dan status pengusahaan (perkebunan rakyat, besar negara dan besar swasta) tahun 2020-2022. Berdasarkan Statistik Kopi Indonesia 2020, perkebunan besar adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum. Perkebunan besar terdiri atas Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) Nasional/Asing. Sedangkan, perkebunan rakyat (tidak berbadan hukum) adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola oleh rakyat/pekebun yang dikelompokkan dalam usaha kecil tanaman perkebunan rakyat dan usaha rumahtangga perkebunan rakyat.

Tabel 5
Luas Lahan Perkebunan Kopi Berdasarkan Status Pengusahaan Tahun 2022

Wilayah	Perkebunan Rakyat (Ha)	Perkebunan Negara (Ha)	Perkebunan Swasta (Ha)
Lampung	157915	-	-
Indonesia	1239113	13969	9508

Sumber: Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022

Sangat kecil jumlah luas lahan perkebunan negara dan swasta untuk tanaman kopi di Indonesia bahkan tidak ada untuk Provinsi Lampung (Tabel 5). Digunakan kedua data tersebut untuk menghitung rerata luas lahan kepemilikan petani kopi di Indonesia dan Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil perhitungan, rerata luas lahan kepemilikan petani kopi di Provinsi Lampung (1,1 Ha/KK) hampir dua kali dari rerata untuk Indonesia (0,65 Ha/KK). Rerata luas lahan kepemilikan petani kopi di Provinsi Lampung tersebut masih jauh dari kebutuhan lahan minimal kopi untuk petani mencapai kesejahteraan, yaitu rerata 4,06 Ha.

Tabel 6
Rerata Luas Lahan Kepemilikan Petani Kopi di Indonesia

Tahun	Luas Area Kopi Perkebunan Rakyat (Ha)	Jumlah Petani (KK)	Ha/KK
Indonesia			
2020	1227191	1858226	0.6604099824
2021	1235461	1887116	0.6546820651
2022	1239113	1875379	0.6607267118
Rerata			0.6586062531
Provinsi Lampung			
	156460	141631	1.104701654
	156396	141597	1.104514926
	157915	142948	1.104702409
Rerata			1.104639663

Sumber: data olahan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan, setiap petani kopi di Provinsi Lampung membutuhkan rerata 4,06 Ha untuk memenuhi kesejahteraan sesuai UMR penduduk. Adapun berdasarkan Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2020-2022, rerata luas lahan kepemilikan petani kopi di Provinsi Lampung masih jauh dari kebutuhan untuk pemenuhan kesejahteraan petani tersebut, yaitu hanya mencapai 27% saja (1,1 Ha/KK).

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Kopi Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2020. *Statistik Harga Produsen Pertanian Provinsi Lampung*. Lampung: BPS Provinsi Lampung.

Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung. 2022. *Produksi Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung 2021*. Lampung: Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.

Direktoral Jendral Perkebunan Nasional. 2022. *Statistik Perkebunan Unggulan Nasional*. Jakarta: Direktoral Jendral Perkebunan Nasional.

Prasmatiwi, Fembriarti E. and Lestari, Dyah Aring H. and Ismono, R H. and Nurmayasari, Indah and Evizal, Rusdi. 2019. Penentuan Harga Pokok Produksi dan Pendapatan Usahatani Kopi di Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. *Seminar Nasional Pengembangan Wilayah Lahan Kering*, 10 September 2019, Bandar Lampung.

Hamni, A. A. 2013. Potensi Pengembangan Teknologi Proses Produksi Kopi Lampung. *Jurnal Mechanical*, 5, 186-202.

Husein, M. 2021. Budaya dan Karateristik Masyarakat Pedesaan. *Aceh Anthropological Journal*, 5, 186-202.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2018-2020. *Upah Minimum Regional/Propinsi (Rupiah)*. Jakarta: Publikasi Data Pusat Statiistik Indonesia.

Perdana, D. T. 2019, Supply Chain Indonesia. Retrieved September 10, 2022, from https://supplychainindonesia.com/peningkatan-daya-saing-komoditas-pertanian/

Surat M/11H.K.04/X/2020. 2020. Penetapan Gaji Minimal di tahun 2022 sepanjang wabah Covid-19. Retrieved from dinaspajak.com: https://dinaspajak.com/umr-lampung-terkini.html#UMP_Lampung_2021

Tamriani. 2019. Analisis Biaya Produksi Dalam Penetapan Harga Jual Kopi Bubuk Manipi Pada Koperasi Kopi Manipi. Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.